

## ABSTRAK

**Mutia Yuantisya, 2018.** “Representasi Fakta-Fakta Sosial-Politik dalam Novel *Amba* Karya Laksmi Pamuntjak”. *Skripsi*. Program Studi Sastra Indonesia, Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang.

Skripsi ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fakta-fakta sosial-politik yang terdapat dalam novel *Amba* karya Laksmi Pamuntjak dengan objek realitas.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara: (1) membaca dan memahami novel *Amba* karya Laksmi Pamuntjak dengan menandai bagian cerita yang menjadi data, dan (2) menginventarisasi data dengan menggunakan format. Penganalisisan data menggunakan teori Sosiologi Sastra dan dilakukan secara deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan hal-hal berikut. Tokoh yang terdapat dalam novel *Amba* karya Laksmi Pamuntjak terdiri atas tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama dalam novel ini adalah *Amba* dan *Bhisma*. Alur/plot yang digunakan adalah alur/plot sorot-balik atau regresif kerana urutan peristiwa yang dikisahkan tidak bersifat kronologis. Latar tempat yang digambarkan dalam novel ini, yaitu Yogyakarta, Pulau Buru, Kadipura, Kediri, Ambon, dan Jakarta, sedangkan latar waktu terjadinya penceritaan pada tahun 1956 – 2006 dengan latar sosial masyarakat Jawa, dan Pulau Buru serta status sosial menengah ke bawah. Tema dan amanat dari novel ini adalah tentang kesetiaan. Representasi fakta-fakta sosial-politik dalam novel *Amba* karya Laksmi Pamuntjak mencakup: (1) dominasi kekuasaan yang terjadi di masa RMS, dan peralihan pemerintahan Orde Lama menuju pemerintahan Orde Baru. Kekuasaan yang dilakukan oleh Presiden Soekarno dan Suharto terkait dengan kebijakan-kebijakan di masa Revolusi semasa kepemimpinan Soekarno dan pemberantas PKI di Indonesia yang dilakukan pada pemerintahan Orde Baru, (2) konflik antargolongan berhubungan dengan konflik antar massa pendukung partai politik dengan paham atau ideologi yang dibawa oleh partai politik ke dalam masyarakat. Konflik yang didasarkan dengan keberpihakan masing-masing simpatisan dan kader-kader partai politik, yaitu PNI, PKI, dan Masyumi untuk mendapatkan kekuasaan di pemerintahan, (3) konflik antarumat beragama atau perang agama yang terjadi di Kepulauan Maluku, Ambon, dan Pulau Buru, dan (4) para tahanan politik serta orang-orang yang terlibat bentrokan dengan golongan lain mengalami kekerasan.